

**PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN BALITA MELALUI  
KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KOTA SURABAYA  
TAHUN 2023**

**Zahra Jasmine<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [zahra.jasmine2022@fisip.unair.ac.id](mailto:zahra.jasmine2022@fisip.unair.ac.id)

**ABSTRAK**

Kasus stunting merupakan kasus yang cukup serius dan perlu untuk segera ditangani dan dituntaskan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan untuk berfokus pada penurunan angka kasus stunting di Surabaya. Berdasarkan data yang dilansir dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), Kota Surabaya yang pada awal tahun 2023 yakni pada Bulan Januari masih memiliki 923 kasus stunting, namun pada Bulan September angka kasus stunting berhasil ditekan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan menghasilkan angka stunting yang berkurang sebanyak 529 kasus sehingga menjadikan Kota Surabaya menjadi pencetak rekor prevalensi *stunting* terendah se-Indonesia, dengan angka prevalensi pada 1,2 persen. Penelitian ini menggunakan teori Impementasi Kebijakan milik Grindle dengan metode penelitian kualitatif berbentuk studi kasus.

**Kata Kunci : Stunting, Surabaya, Kasus Stunting, Implementasi Kebijakan.**

***ABSTRACT***

*The stunting case is quite a serious case and needs to be handled and resolved immediately. Therefore, in 2023 the Surabaya City Government will make a policy to focus on reducing the number of stunting cases in Surabaya. Based on data reported from the SSGI (Indonesian Nutritional Status Survey), the City of Surabaya, which at the beginning of 2023, namely in January, still had 923 cases of stunting, however in September the number of stunting cases was successfully reduced by the Surabaya City Government, resulting in the number of stunting being reduced by as much as 529 cases, making the city of Surabaya the record holder for the lowest stunting prevalence in Indonesia, with a prevalence rate of 1.2 percent. This research uses Grindle's Policy Implementation theory with a qualitative research method in the form of a case study.*

**Keywords:** *Stunting, Surabaya, Stunting Cases, Policy Implementation.*

---

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan data dan berita yang terdapat pada laman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya bergotong royong untuk menekan stunting hingga angka stunting di Pemerintah Kota Surabaya berhasil menjadi yang terendah se-Indonesia per

September 2023. Kebijakan ini diimplementasikan dengan melalui program Zero Stunting yang berhasil menjadikan Kota Surabaya dengan angka stunting terendah se-Indonesia atau terendah secara nasional, dimana hal ini merupakan salah satu hasil dari implementasi kebijakan yang berhasil diterapkan dengan berbagai macam program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingannya yang turut terlibat. Dari data yang terdapat pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka kasus stunting menurun secara signifikan di akhir tahun 2022 dengan angka kasus sekitar 4,8 persen (923 balita) dari yang awalnya pada tahun 2021 masih terdapat angka kasus stunting sekitar 28,9 persen atau sebanyak 6.722 balita. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan angka prevalensi stunting di Surabaya menjadi yang terendah secara nasional dimana tercatat hanya tinggal tersisa sekitar 4,8 persen atau sebanyak 923 balita. Angka kasus stunting pun terus menurun pada tahun 2023 hingga saat ini (Dinas Kominfo, 2023).

Pada data yang tercatat pada awal Januari 2023, Kota Surabaya memiliki kasus stunting sebanyak 923 kasus, lalu Bulan Februari 2023 dengan 872 kasus, Bulan Maret 2023 dengan 850 kasus, Bulan April 2023 dengan 805 kasus, Bulan Mei 2023 dengan 760 kasus, Bulan Juni 2023 dengan 712 kasus, Bulan Juli 2023 dengan 653 kasus, Bulan Agustus 2023 dengan 583 kasus, Bulan September 2023 dengan 533 kasus, dan dari data yang didapatkan hingga tanggal 26 September 2023, kasus stunting di Surabaya telah menurun sebanyak 529 kasus. SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) juga melakukan pendataan mengenai prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada level 21 persen. Sedangkan prevalensi stunting di Kota Surabaya pada tahun 2022 hanya tersisa sebanyak 1,22 persen berdasarkan bulan penimbangan serentak. (Dinas Kominfo, 2023).

Adanya kebijakan penurunan stunting atau *zero stunting* ini merupakan implementasi kebijakan yang digagas oleh Pak Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya. Semenjak menjabat, Walikota Surabaya memang sejak awal telah langsung memfokuskan kebijakannya pada penanganan terkait dengan kasus stunting yang ada di Kota Surabaya. Penanganan terkait dengan kasus stunting ini juga sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Presiden terkait dengan pentingnya penanganan stunting karena hal ini menyangkut tentang nasib masa depan generasi penerus bangsa di Indonesia menuju generasi emas di tahun 2045. Walikota Surabaya juga mengatakan bahwa kebijakan stuntingnya berusaha untuk selalu digerakkan terlebih pada tahun 2023 ini, supaya Surabaya zero stunting dapat tercapai (Dinas Kominfo, 2023).

Walikota Surabaya bersama dengan jajaran Pemerintah Kota memang sudah sedari awal bekerja sama untuk berfokus pada menekan angka stunting. Langkah pertama yang dilakukan ialah dimulai dari pendataan, dimana setiap calon pengantin yang akan menikah langsung terdeteksi data kesehatannya. Semua data calon pengantin tersebut terintegrasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Puskesmas. Adanya pendataan ini penting untuk mempermudah mengetahui masyarakat yang memiliki resiko kekurangan gizi. Pendataan yang diakukan menjadikan bagaimana ukuran lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh calon pengantin dapat diketahui secara langsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat resiko kekurangan gizi atau energi kronis, sehingga sudah dapat dilakukan langkah antisipasi sedari awal. Dari pendataan itulah kemudian dilakukan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Puskesmas dengan memberikan tambahan gizi dan sebagainya (Dinas Kominfo, 2023).

Setelah dilakukan pendataan, pihak Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dan melakukan gotong royong dengan warga seluruh Kota Surabaya, salah satunya ialah dengan melalui aplikasi 'Sayang Warga'. Melalui aplikasi 'Sayang Warga' tersebut, para Kader Surabaya Hebat (KSH), RT atau RW, dan juga warga dapat mendata serta melaporkan kondisi balita yang terdapat di sekitarnya. Adanya kolaborasi antara warga, kader-kader organisasi yang berwenang, serta masyarakat setempat dengan pemerintah, menjadikan semua permasalahan mengenai stunting dapat terdeteksi untuk kemudian dapat segera diberikan solusinya. Hal ini juga tidak hanya bertujuan untuk menangani kasus stunting saja, tetapi juga untuk menangani kasus rumah yang tidak layak huni, masalah-masalah pada bidang sosial, pendidikan, dan lainnya. Pada tingkat RW juga terdapat dapur umum yang dimana masyarakat setempat bekerja sama untuk saling membantu terkait dengan pemberian makanan bagi balita di wilayah sekitarnya. Tidak hanya itu, pihak pemerintah Kota Surabaya pada satu minggu sekali juga secara rutin membagikan dan mensosialisasikan kepada remaja putri di sekolah-sekolah terkait dengan manfaat dari Tablet Tambah Darah (TTD) yang bisa diambil di seluruh puskesmas pada wilayah Kota Surabaya. Kemudian terdapat pula adanya kebijakan Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada serta pemeriksaan kesehatan pada Anak Usia Sekolah (Dinas Kominfo, 2023).

Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) melalui program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dalam program tersebut, calon pengantin yang akan menikah mendapatkan beberapa pelayanan seperti

pelayanan gizi dan kesehatan hingga konseling. Dalam program ini, Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan kesehatan kepada sasaran yang dinilai memiliki resiko stunting. Selain adanya pendampingan bagi pasangan calon pengantin, juga terdapat pula pendampingan untuk ibu dan balita. Melalui kebijakan ini, para ibu yang baru memiliki anak usia balita diberikan penyuluhan terkait dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan juga terdapat pula pemberian pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diresepkan oleh Dokter Spesialis Anak kepada balita yang mengalami malnutrisi atau memiliki penyakit tertentu. Diberikan pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) yang berupa multivitamin dan mineral untuk balita, pemberian menu sehat pada ibu dan balita, serta praktik demo memasak makanan sehat (Dinas Kominfo, 2023).

Tidak sampai disitu, kolaborasi dan kontribusi yang dilakukan oleh warga beserta kader-kader masyarakat yang terlibat juga turut mengimplementasikan beberapa kebijakan yang ada seperti program pemberian makanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK bersama dengan entitas-entitas dari lintas berbagai sektor, kebijakan imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut penulis, penurunan angka stunting yang terjadi pada Kota Surabaya tidak terlepas dari aksi kolaborasi, keberhasilan *policy implementation*, beserta *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta para kader masyarakat selama ini. Implementasi kebijakan atau *policy implementation* yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ialah dengan melakukan pelaksanaan diskusi terkait dengan stunting di tingkat kota, dimulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, hingga peran serta dari tokoh masyarakat. Dengan penerapan *policy implementation* tersebut, disusunlah pemecahan masalah atau yang biasa kita kenal sebagai rekomendasi kebijakan yang kemudian ditentukan dari hasil intervensi sensitif yang mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing - masing wilayah di kelurahan dan kecamatan yang terletak di Kota Surabaya. Dengan berbagai program dari hasil implementasi kebijakan atau *policy implementation* tersebut, angka kasus stunting di Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga saat ini pada tahun 2024, mengalami penurunan yang secara terus menerus menurun dan berhasil menjadi yang terendah se-Indonesia (Dinas Kominfo, 2023).

## LANDASAN TEORI

**1. Teori Implementasi Kebijakan****(1) Implementasi Kebijakan menurut Grindle**

Aktivitas implementasi akan menghasilkan keluaran berupa dampak pada masyarakat, individual maupun kelompok-kelompok. Serta menghasilkan outcomes yang memberikan perubahan beserta dengan penerimaan-penerimaan yang mengikutinya. Menurut Grindle, aktivitas implementasi dipengaruhi oleh konten kebijakan seperti kepentingan yang terdampak, macam-macam keuntungan yang didapat, sejauh mana perubahan yang diharapkan, situs pembuatan kebijakan, implementor program, serta sumber daya-sumber daya yang berkomitmen. Selain dari konten kebijakan, aktivitas implementasi juga dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat, karakteristik dari institusi dan rezim, serta kepatuhan dan responsifitas yang dilakukan (Grindle, 1980).

Menurut Grindle, implementasi kebijakan bersifat administratif dan politis. Kedua proses yang dijelaskan oleh Grindle menunjukkan bahwa suatu program kebijakan harus secara langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang terinci dengan jelas, seperti yang disyaratkan dalam model Gridle. Bagaimana proses implementasi kebijakan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program telah dirancang, dan terdapat dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai syarat dasar (Grindle, 1980).

**KAJIAN PUSTAKA**

- I. Endang Retno Surjaningrum, Eldatia Utari Putri, Nur Ainy Fardana N., Lucia Tri Suwanti, Lutfi Agus Salim, Esti Yunitasari, Bani Bacan Hacantya Yudanagara, Lantip Muhammad Dewabratra. 2022. Peta Potensi Pengentasan Stunting Di Kota Surabaya. Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal). 2022. SP(1): 97–103.**

Jurnal penelitian ini berkontribusi dalam memberikan referensi mengenai faktor-faktor apa saja yang paling mendukung proses penurunan stunting di Surabaya adalah adanya dana dan tim khusus dari pemerintah kota serta kemauan tim kelurahan dan kader untuk menjalankan program. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah kondisi sosial dan kesadaran masyarakat yang masih belum sepenuhnya menganggap kebiasaan lama yang tidak tepat perlu segera diubah demi kebaikan bersama. Pemerintah kota Surabaya dapat memaksimalkan pelayanan yang sudah ada di PUSPAGA untuk turun langsung ke orangtua atau keluarga stunting untuk memberikan edukasi mengenai pola asuh yang tepat untuk anak secara personal ataupun berkelompok. Topik yang diberikan dapat mengenai tumbuh kembang anak, alternatif

pola pengasuhan ketika anak menolak mengonsumsi makanan bergizi, serta regulasi emosi kepada orangtua supaya secara pengasuh sudah lebih siap secara mental sebelum mulai mengasuh anak.

**II. Idham Choliq, Dede Nasrullah, Mundakir. 2020. Pencegahan Stunting Di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak. Humanism Jurnal Pengabdian Masyarakat. HUMANISM Vol.1 No. 1.**

Penelitian ini berkontribusi pada penjelasan partisipasi aktif dari para kader dan masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah gizi anak *stunting*. Jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa melalui program modul pembuatan menu modifikasi makanan sehat, produk makanan dan meningkatkan status kesehatan keluarga terutama anak, pencegahan stunting dapat dilakukan. Selain itu juga dapat dicapai dengan upaya perbaikan gizi berbasis modifikasi makanan pengganti asi (MP-ASI) yang ekonomis serta menarik yang memiliki manfaat meningkatkan status kesehatan anak.

**III. Marsella Arlin Permatasari dan Deby Febriyan Eprilianto. 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Mencapai Zero Stunting Di Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Publika. Volume 11 Nomor 4, Tahun 2023, 2637-2650.**

Jurnal penelitian ini mengkaji mengenai partisipasi aktif masyarakat dalam program untuk mencapai Zero Stunting di Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukan dari faktor pendukung mayarakat yang memiliki kemauan, kemampuan serta kesempatan untuk mengikuti program atau kegiatan dalam pengentasan stunting di Kelurahan Bulak Banteng. Namun, masyarakat hanya sekedar mengikuti rangkaian kegiatannya tanpa menjalankan intervensi dari pihak puskesmas dan diketahui dari faktor penghambatnya bahwa pekerjaan masyarakat sebagian besar buruh kasar sehingga berpenghasilan rendah dan tidak mampu untuk memberikan makanan gizi seimbang pada anak, kurangnya pengetahuan orang tua pada pencegahan stunting, serta tidak adanya peran ayah dalam pengentasan stunting serta mayoritas masyarakat Kelurahan Bulak Banteng yang merupakan Suku Madura sehingga lebih memegang kepercayaan pada adat istiadatnya seperti memijat anak pada dukun bayi hingga kepercayaan pada budaya leohan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.(Dupraw, 2018 dan Guion et al., 2002) Penelitian kualitatif terdiri dari praktik interpretasi material yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mengubah dunia dengan mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Dimana peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena dalam kaitannya dengan makna yang diberikan orang kepadanya. (Armatas dkk., 2021 dan Hussein, 2018).

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah studi kasus. Jenis studi kasus kualitatif dibedakan berdasarkan besar kecilnya batasan kasus, misalnya apakah kasus tersebut melibatkan satu individu, beberapa individu, satu kelompok, program besar, atau suatu kegiatan. Studi kasus juga dapat dibedakan berdasarkan tujuan analisis kasusnya (Armatas et al., 2021 dan Gerring, 2004).

Metode disini berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditentukan bagi pengguna untuk memahami objek sasaran yang diinginkan untuk mencapai tujuan atau sasaran konflik atau pemecahan masalah. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan metode tertentu secara cermat, sistematis, dan sempurna terhadap suatu permasalahan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini. Penerapan kebijakan penurunan kasus stunting di Kota Surabaya merupakan fokus penelitian yang tepat untuk dipadukan dengan studi kasus. Hal ini tentunya juga terkait dengan angka stunting di Kota Surabaya yang mencapai hampir 1000 kasus. Dengan adanya studi kasus, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Aktivitas Implementasi menurut Konten Kebijakan****(1) Kepentingan yang Terdampak**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya tahun 2023 dapat dilaksanakan karena ada kepentingan yang terdampak yakni kepentingan untuk pelaksanaan program Pemerintah Kota Surabaya beserta kepentingan masyarakat Surabaya

yang keluarganya atau warganya masih mengalami stunting, sehingga kebijakan ini perlu untuk diimplementasikan sebagai bentuk dari penuntasan masalah yang terjadi.

**(2) Keuntungan yang Didapat**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dilaksanakan karena adanya faktor keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat disini yakni berupa diharapkannya tidak ada lagi balita yang mengalami kurang gizi, pertumbuhan dan perkembangannya akan dapat berjalan baik, dan akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa khususnya generasi anak-anak muda di Surabaya yang cerdas dan sehat.

**(3) Perubahan yang Diharapkan**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dilaksanakan karena adanya faktor perubahan yang diharapkan. Dengan adanya implementasi kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya ini, diharapkan nantinya Kota Surabaya akan menjadi kota dengan angka stunting yang berjumlah nol atau *zero stunting*.

**(4) Situs Pembuatan Kebijakan**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dilaksanakan karena adanya faktor situs pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dibuat berdasarkan hasil rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya.

**(5) Implementor Program**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dilaksanakan karena adanya faktor implementor program. Implementor program dalam kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya ini adalah Pemerintah Kota Surabaya, para KaderSurabaya Hebat, Kementerian Agama, Puskesmas-Puskesmas terkait, para perangkat desa, maupun RT dan RW, tim kader PKK, Tim Pendamping Keluarga, hingga warga sipil setempat.

**(6) Sumber Daya yang Berkomitmen**

Implementasi kebijakan terkait dengan pengentasan stunting di Kota Surabaya dilaksanakan karena adanya faktor sumber daya yang berkomitmen. Sumber daya yang berkomitmen yang dimaksud disini adalah masyarakat yang memiliki anak atau balita dengan

kategori stunting, berkomitmen untuk mau menuntaskan permasalahan stuntingnya dengan dibantu oleh Pemerintah Kota Surabaya serta dinas-dinas terkait secara berkesinambungan.

## **2. Aktivitas Implementasi menurut Konteks Implementasi**

### **(1) Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat**

Kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya dapat dilaksanakan karena adanya kekuatan, kepentingan dan juga strategi dari aktor yang terlibat. Aktor terlibat yang dimaksud disini adalah Pemerintah Kota Surabaya, para Kader Surabaya Hebat, Kementerian Agama, Puskesmas-Puskesmas terkait, para perangkat desa, maupun RT dan RW, tim kader PKK, Tim Pendamping Keluarga, hingga warga sipil setempat, yang tidak memiliki balita stunting ataupun yang memiliki balita stunting.

### **(2) Karakteristik dari Institusi dan Rezim**

Kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya dapat dilaksanakan juga karena dipengaruhi oleh karakteristik dari institusi dan rezim yang terlibat. Karakteristik dari institusi dan rezim yang terlibat disini adalah perangkat Pemerintah Kota yang lebih berfokus pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anak dan balita. Sehingga kemudian menjadi berkorelasi apabila implementasi kebijakan yang dilakukan adalah terkait dengan implementasi kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya.

### **(3) Kepatuhan dan Responsifitas yang Dilakukan**

## **3. Hasil dari Implementasi Kebijakan**

### **(1) Dampak pada Masyarakat, Individual maupun Kelompok-Kelompok**

Dampak dari implementasi kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya adalah menurunnya angka prevalensi stunting di Surabaya yang kemudian berhasil menjadikannya sebagai kota dengan angka stunting terendah tingkat nasional atau se-Indonesia dengan data yang tercatat pada awal Januari 2023, Kota Surabaya memiliki kasus stunting sebanyak 923 kasus, lalu Bulan Februari 2023 dengan 872 kasus, Bulan Maret 2023 dengan 850 kasus, Bulan April 2023 dengan 805 kasus, Bulan Mei 2023 dengan 760 kasus, Bulan Juni 2023 dengan 712 kasus, Bulan Juli 2023 dengan 653 kasus, Bulan Agustus 2023 dengan 583 kasus, Bulan September 2023 dengan 533 kasus, dan dari data yang didapatkan hingga tanggal 26 September 2023, kasus stunting di Surabaya telah menurun sebanyak 529 kasus. SSGI juga mendata prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2022 dengan rata-rata masih berada di level 21

persen. Sedangkan berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Surabaya pada tahun 2022 hanya tinggal 1,22 persen.

## (2) Perubahan yang Diberikan

Perubahan yang diberikan dengan adanya implementasi kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya adalah meningkatnya kesejahteraan bagi anak-anak dan balita yang sedang mengalami masa perkembangan dan pertumbuhan dikarenakan tercukupinya gizi-gizi yang seimbang, dan juga tercukupinya makanan sehat serta didapatkannya vitamin-vitamin tambahan yang berguna untuk menunjang tumbuh kembang setiap anak yang terindikasi stunting sehingga nantinya diharapkan akan dapat tumbuh dengan normal dan sehat sebagaimana mestinya.

## (3) Penerimaan-Penerimaan yang Mengikutinya

Implementasi kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya sangat diterima oleh berbagai alangan masyarakat, baik itu yang terdampak secara langsung ataupun tidak. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan yang dilakukan sejalan dengan visi misi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yakni kesehatan. Terutama kesehatan dalam keluarga seperti anak-anak dan juga balita.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah keberhasilan implementasi kebijakan atau *policy implementation* dalam kebijakan pengentasan stunting di Kota Surabaya tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor *collaborative governance*, yakni adanya kolaborasi dan kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta dengan warga sipil, kader-kader masyarakat yang terlibat yang juga turut mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti program pemberian permakanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK bersama dengan entitas-entitas dari lintas berbagai sektor, kebijakan imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut penulis, penurunan angka stunting yang terjadi pada Kota Surabaya tidak terlepas dari aksi kolaborasi, beserta *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta para Kader Surabaya Hebat, Kementerian Agama, Puskesmas-Puskesmas terkait, para perangkat desa, maupun RT dan RW, tim kader PKK, hingga Tim Pendamping Keluarga,. Implementasi kebijakan atau *policy implementation* yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah

Kota Surabaya ialah dengan melakukan pelaksanaan diskusi terkait stunting di tingkat kota, dimulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar hingga peran serta dari tokoh masyarakat. Dengan berbagai program dari hasil implementasi kebijakan atau *policy implementation* tersebut, angka kasus stunting di Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga saat ini pada tahun 2023, mengalami penurunan yang secara terus menerus menurun dan berhasil menjadi yang terendah se-Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alaerts, G. J. (2020). Adaptive policy implementation: Process and impact of Indonesia's national irrigation reform 1999–2018. *World Development*, 129, 104880. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104880>
- Allam, D. (2021). Explaining the persistence of "decentralisation" of education in Egypt. *International Journal of Educational Development*, 82(September 2020), 102357. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102357>
- Armatas, C. A., Borrie, W. T., & Watson, A. E. (2021). A Social Science Method for Public Engagement in the Context of Natural Resource Planning in the United States. *Society and Natural Resources*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2021.1996666>
- Brinkerhoff, D. W. (1996). Coordination issues in policy implementation networks: An illustration from Madagascar's environmental action plan. *World Development*, 24(9 SPEC. ISS.), 1497– 1510. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00046-0](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00046-0)
- Crosby, B. L. (1996). Policy implementation: The organizational challenge. *World Development*, 24(9 SPEC. ISS.), 1403–1415. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00050-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00050-2)
- Dupraw, M. E. (2018). Defining landscape-scale collaboration as used to restore forests and reduce catastrophic wildfires. *Qualitative Report*, 23(11), 2774–2816.
- Edwards, S., & Heiduk, F. (2015). Hazy Days: Forest Fires and the Politics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34(3), 65–94.
- Ewig, C., & Palmucci, G. A. (2012). Inequality and the Politics of Social Policy Implementation:
- Gender, Age and Chile's 2004 Health Reforms. *World Development*, 40(12), 2490–2504. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.033>

Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for? *American Political Science Review*, 98(2), 341–354. <https://doi.org/10.1017/S0003055404001182>

Grindle, M. . (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.